



Stiftung
Asienhaus



Gambar: RAN/OPPUK/Nanang Sujana

Stiftung Asienhaus, Sawit Watch, AG Ressourcen dan TPOLS

Oliver Pye, Fitri Arianti, Rizal Assalam, Michaela Haug, Janina Puder¹

Transisi yang Adil dalam Industri Sawit: Sudut Pandang Awal

Pengantar

Industri sawit saat ini beroperasi dengan tidak berkelanjutan, baik dari segi ekologis maupun sosial. Ini karena model bisnis sawit beroperasi melalui cara-cara penjarahan sumber daya alam, budidaya monokultur skala besar yang merusak keanekaragaman hayati yang ada dan penggunaan herbisida, pestisida, dan pupuk kimia secara luas. Model ekologi yang menganggap murah alam ini berkaitan dengan model sosial yang bergantung pada tenaga kerja yang murah pula (Pye 2018).

Miliarder penguasa sawit memperoleh untung besar dengan cara memeras keringat pekerja: mana upah rendah, status kerja yang tidak menentu, dan kondisi kerja yang buruk. Praktik eksploitasi ini merupakan sistem yang dijalankan dari industri sawit.

Inisiatif-inisiatif yang saat ini berupaya menangani keberlanjutan seperti RSPO tidaklah menolak model bisnis sawit yang merusak. Oleh karenanya, inisiatif tersebut tidak dapat mengubah industri agar berorientasi pada kehidupan masa depan. Kepentingan bisnis cenderung mendominasi inisiatif-inisiatif tersebut, sementara kepentingan pekerja dikesampingkan. Ekspansi yang semakin jauh menjarah wilayah hutan dan lahan adat tidak diselesaikan dengan semestinya (Pye, 2016).

Seringkali, kelompok keadilan lingkungan dan masyarakat setempat terlalu lemah untuk bisa menghentikan perusahaan besar yang menjalankan operasinya secara lintas batas negara. Selain itu, gerakan keadilan lingkungan juga tidak terhubung dengan para pekerja di dalam perkebunan itu sendiri. Jika kita lihat sekilas,

kelompok sosial dan lingkungan dan serikat pekerja seringkali memiliki kepentingan yang saling bertolak belakang.

Gerakan lingkungan biasanya mengabaikan persoalan-persoalan perburuhan. Tidak jarang pula kampanye keadilan iklim menuai protes dari pekerja dan serikat pekerja. Masyarakat adat yang bergantung pada alam sekitarnya menderita akibat pencemaran sungai, degradasi lahan dan pengusiran tempat tinggal akibat ekspansi perkebunan.

Di lain pihak, pekerja sawit sering bereaksi defensif jika pihak pemberi kerja 'mereka' dikritik karena melakukan perusakan lingkungan atau pelanggaran hak asasi manusia. Para pekerja juga tampak khawatir akan kehilangan pekerjaan jika perusahaannya ditutup atau perluasan bisnisnya dibatasi.

Tulisan ini hendak membahas tentang perspektif Transisi yang Adil, yaitu perubahan sosial-ekologis terhadap industri sawit. Perhatian utama perspektif ini adalah mengatasi pertentangan antara tuntutan buruh dan keadilan lingkungan serta bagaimana perspektif ini dapat dikembangkan dalam praktik melalui kolaborasi antara pekerja, masyarakat adat dan gerakan keadilan lingkungan. Karena banyak izin perkebunan saat ini hampir habis masa berlakunya, hal itu dapat memunculkan suatu peluang untuk membentuk transformasi sosial-ekologis dari lanskap yang monokultur ini – sebuah peluang yang perlu diusahakan.

1 Penulis adalah para akademisi dan aktivis yang bekerja bersama dalam jaringan Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS). Gagasan dalam tulisan ini dikembangkan melalui diskusi bersama pekerja, serikat pekerja, feminis, dan aktivis keadilan lingkungan yang bekerja di industri sawit. Secara khusus, dilakukan wawancara bersama anggota TPOLS berikut ini: Daisy Arago (Center for Trade Union and Human Rights/CTUHR Filipina), Aurelio Estrada (Federation of Agricultural Workers/ UMA Filipina), Yuyun Harmono (WALHI, Friends of the Earth Indonesia), Mathias (Serikat Pekerja Nasional Indonesia), Supono (Serikat Buruh Perkebunan Indonesia), Triana Kurnia Wardani (Serikat Perempuan Indonesia/SERUNI), Wayan Sutomo (AGRA Kalimantan Tengah), Hotler Zidane (Koalisi Buruh Sawit Indonesia). Tulisan ini tidak secara resmi mewakili sikap TPOLS, melainkan hanya sebagai kontribusi terhadap debat yang ada saat ini tentang Transisi yang Adil di Industri Sawit.



Pendekatan Transformatif Transisi yang Adil dengan memperhatikan kepentingan pekerja. Seorang pekerja perempuan bekerja tidak dibayar membantu suaminya mengumpulkan berondolan buah sawit di PT. London Sumatera (Lonsum), Deli Serdang, Sumatera Utara (Gambar: RAN/OPPUK/Nanang Sujana)

1. Apakah Transisi yang Adil itu?

Menanggapi Kondisi Darurat Iklim, ada banyak serikat pekerja di seluruh dunia yang telah mengembangkan strategi *Transisi yang Adil*. Barry (2013: 237) mendefinisikan Transisi yang Adil sebagai “suatu strategi dari transisi yang terkelola untuk menuju ekonomi hijau, rendah karbon, dan energi terbarukan, termasuk penciptaan lapangan kerja kerah hijau (sektor lingkungan) yang layak.”

Ide mendasar dari Just Transition sendiri adalah agar pekerja dan serikat yang bekerja di industri yang tidak berkelanjutan dan merusak iklim dapat mengembangkan sikap yang proaktif untuk mengubah industri tersebut atau bahkan keluar darinya (dalam kasus industri bahan bakar fosil), sambil tetap mempertahankan pekerjaan dan tanpa mengurangi kualitas upah dan kondisi kerja.

Secara umum, Transisi yang Adil menandakan adanya suatu pendekatan yang komprehensif dan fleksibel untuk membantu pekerja yang mengalami dampak negatif untuk menghadapi biaya dan tantangan perubahan iklim dan proses transformasi menuju 'penghijauan' ekonomi (Kohler 2010). Mereka yang mendukung Transisi yang Adil menuntut kompensasi yang adil bagi pekerja dan masyarakat yang mengalami dampak negatif atas kerugian ekonomi dan kesehatan yang dideritanya (View, 2002).

Poin penting untuk semua perspektif Transisi yang Adil adalah bahwa strategi yang mengupayakan dekarbonisasi ekonomi cenderung mengabaikan kebutuhan dan aspirasi banyak pekerja yang saat ini bekerja di industri 'coklat' (industri yang penuh dampak negatif terhadap lingkungan) atau industri yang tidak berkelanjutan (Puder 2019).

Secara garis besar, ada tiga cara utama menuju Transisi yang Adil (Stevis dan Felli 2015). **Yang pertama** adalah posisi defensif di mana serikat pekerja diikutsertakan dalam negosiasi tripartit dalam wacana hegemoni pertumbuhan hijau dan Pembangunan Berkelanjutan (Smith 2017, OECD 2017, ILO 2015). Dalam hal ini, serikat pekerja sering mencoba memperlambat terjadinya transisi untuk melindungi para anggotanya dari dampak sosial transisi tersebut, seperti hilangnya pekerjaan

Contohnya adalah sikap yang diambil oleh Dewan Serikat Pekerja Jerman dalam negosiasi tentang industri batu bara, di mana Dewan Serikat Pekerja dalam hal ini berposisi berseberangan dengan aktivis keadilan iklim untuk mencegah proses keluar yang terlalu cepat dari industri tersebut (DGB 2020).

Sementara **posisi kedua** lebih proaktif karena serikat pekerja menuntut intervensi pemerintah untuk mendukung pengembangan industri hijau dan peningkatan keterampilan pekerja, misalnya dalam *platform* kebijakan seperti Green New Deal di Amerika Serikat atau Revolusi



Lanskap perkebunan sawit dikuasai oleh perusahaan perkebunan monokultur berskala besar yang merusak lingkungan. Kilang dan perkebunan di Sabah, Malaysia (Gambar: Oliver Pye)

Industri Hijau yang diusulkan oleh Partai Buruh di Britania Raya.

Contoh lain untuk posisi ini adalah kampanye 'Satu Juta Pekerjaan Iklim' (*One Million Climate Jobs*) yang diusung oleh serikat pekerja Inggris, yang menuntut intervensi pemerintah di sektor-sektor utama. Contoh ini menunjukkan bagaimana proses transisi dapat menciptakan pekerjaan yang dalam jumlah lebih banyak dan lebih baik di industri hijau (Kampanye melawan Perubahan Iklim 2014).

Posisi ketiga mengambil pendekatan 'sosial-ekologis' yang lebih transformatif. Dalam pendekatan ini, serikat pekerja dan pekerja secara aktif menggunakan kekuatan serikat dan strukturalnya untuk mendorong terjadinya transformasi sosial-ekologis pada industri mereka. Ini berkaitan dengan pemahaman pekerja tentang perubahan iklim dan kerusakan ekologis sebagai akibat dari hubungan produksi kaum kapitalis berdasarkan prinsip akumulasi kapital yang tak terbatas dan pertumbuhan ekonomi yang konstan (Räthzel *et al.*, 2018; Stevis *et al.*, 2018) dan berkaitan dengan perubahan meluas pada struktur ekonomi.

Serikat Pekerja Tambang Nasional (NUMSA) di Afrika Selatan, contohnya, berupaya untuk mengakhiri penggunaan batu bara serta menuntut kendali dan pengelolaan sektor energi terbarukan secara demokratis (Räthzel *et al.*, 2018). Contoh lain adalah Federasi Pekerja

Bangunan (BLF) di Australia, yang pada tahun 1970-an menggelar aksi mogok kerja untuk mencegah proyek pembangunan yang merusak di taman kota dan tempat rekreasi – yang mereka sebut sebagai 'Larangan Hijau' (Burgmann dan Burgmann 1999).

Sejauh ini, belum ada perspektif Transisi yang Adil yang telah dikembangkan oleh serikat pekerja di industri sawit. Dalam tulisan ini, kami mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dan transformatif menggunakan cara kedua dan ketiga. Kami yakin bahwa aliansi dengan kelompok lingkungan dan organisasi akar rumput lainnya dapat membantu serikat pekerja dalam mengembangkan strategi transformatif dan model produksi alternatif, yang diharapkan dapat mempertemukan antara tuntutan lingkungan dan gerakan buruh.

2. Industri Sawit – masalah sosial-ekologis

Para pendukung bisnis industri sawit melihat peningkatan permintaan global untuk sawit sebagai alasan untuk memperluas wilayah operasi perkebunan. Mereka juga sering menggunakan klaim kontribusi industri sawit dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja (mis. Dewan Minyak Sawit Indonesia/DMSI 2007; World Growth 2011).

Namun banyak penelitian menunjukkan bahwa ekspansi minyak sawit justru memiliki banyak dampak buruk sosial dan ekologis yang merusak. Sementara produksi minyak sawit dengan cara yang berjalan seperti saat ini berdampak pada krisis iklim global.

Indonesia termasuk di antara tiga penghasil Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar di dunia akibat deforestasi, degradasi lahan gambut, dan kebakaran hutan. Industri sawit dalam hal ini merupakan pendorong utama dari semua bentuk kerusakan lingkungan ini. Ekspansi sawit menyebabkan terjadinya deforestasi (Koh dan Wilcove, 2008; Dohong *et al.*, 2018; Austin *et al.*, 2019), hilangnya keanekaragaman hayati (Wilcove dan Koh, 2010; Vijay *et al.*, 2016) dan pemanasan global (Reijnders dan Huijbregts, 2008; Goldstein 2015).

Ekspansi sawit ke dalam kawasan hutan terkait erat dengan kebakaran hutan dan lahan gambut. Peristiwa ini telah berulang kali melanda Indonesia selama beberapa dekade terakhir (Varkkey 2015). Dampak ekologi lebih lanjut berupa penurunan kualitas tanah akibat penggunaan herbisida, pestisida dan pupuk kimia yang mencemari tanah, sungai dan air tanah.

Studi yang memperhatikan masalah-masalah sosial menunjukkan bahwa sawit tidak serta merta berpihak pada masyarakat miskin (misalnya dalam Li, 2015; Elmhirst *et al.*, 2017). Meskipun berhasil membawa kemakmuran bagi sebagian orang, minyak sawit menghadirkan (kembali) kemiskinan bagi orang lain – tergantung cara yang digunakan untuk memasukkan masyarakat ke dalam ekonomi industri sawit. 'Antusiasme' terbesar untuk sawit (Rist, Feintrenie dan Levang, 2010; Rival dan Levang, 2014) ditemukan di kalangan pengusaha lokal yang berkemampuan membangun kebun-kebun sawit kecil atau menengah.

Namun sebagian besar tanaman sawit (sekitar 60%) dibudidayakan oleh perusahaan swasta dan perusahaan BUMN di perkebunan monokrop (budi daya dengan satu komoditas tunggal) berskala besar, yang menciptakan lapangan kerja bagi segelintir pekerja tetap. Sementara sebagian besarnya hanyalah terdiri dari pekerja berstatus borongan dan harian lepas (Li 2015, 2017) yang bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan tanpa kepastian kerja (Pye *et al.*, 2012).

Kebanyakan masyarakat adat yang tinggal di wilayah tempat perkebunan sawit beroperasi sangat kurang mendapatkan informasi dan jarang diberi kesempatan untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam pengembangan sawit. Sebaliknya, mereka justru sering menderita akibat pembukaan lahan yang tidak transparan, pencemaran air, dan perampasan lahan. Keadaan ini merusak kehidupan mandiri masyarakat sekaligus memantik banyaknya



Industri sawit seringkali memicu konflik lahan dengan masyarakat Petani masyarakat lokal memblokir jalan akses perkebunan sawit dan mengadakan aksi simbolik menumpahkan darah babi di jalan, Kalimantan Barat, Indonesia (Gambar: Irendra Radjawali)

kasus perlawanan dan konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang tak kunjung usai (Colchester *et al.*, 2006, Potter, 2009; McCarthy, 2010; Haug, 2014).

Skema yang dikelola oleh industri sawit sendiri untuk mengatasi masalah ini, seperti misalnya RSPO, masih lemah, sebagaimana telah ditunjukkan oleh kejadian kebakaran hutan dan kabut asap yang baru-baru ini terjadi di seluruh kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan sosial-ekologis yang lebih mendasar terhadap industri, yang lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan serta dirancang untuk masa depan jangka panjang.

3. Konflik (secara teori maupun praktik) antara Pekerja dan Gerakan Keadilan Lingkungan di Sektor Sawit

Meskipun para pendukung lingkungan hidup, serikat pekerja dan aktivis hak masyarakat adat berjuang melawan

konsekuensi ekologis dan sosial negatif yang diakibatkan oleh perluasan sawit di Indonesia, namun ketiga kelompok tersebut mempersoalkan masalah-masalah dan tuntutan yang berbeda.

Para pendukung lingkungan hidup menempatkan persoalan-persoalan keadilan lingkungan sebagai fokus utama dan bekerja untuk mencegah terjadinya perluasan lebih lanjut perkebunan sawit. Sementara serikat pekerja menuntut perbaikan kondisi kerja dan peningkatan gaji di perkebunan.

Industri sawit telah mendapatkan perhatian luas secara global terutama bagi para pendukung lingkungan hidup yang peduli akan masalah deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Sayangnya, persoalan pelanggaran hak-hak pekerja tampaknya cenderung dikesampingkan dari luasnya perhatian global ini.

Selama lima tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya laporan dan penelitian, tampak bahwa praktik penggunaan buruh anak, kerja paksa, kondisi kerja dan kehidupan yang buruk, upah murah, dan pemberangusan serikat pekerja banyak dijumpai di sektor ini (Amnesty International 2016). Pekerja sawit menuntut perusahaan sawit agar menerapkan upah yang adil, kebebasan berserikat, dan kondisi kerja dan kondisi hidup yang lebih baik.

Di sisi lain, kelompok masyarakat adat yang menuntut pengakuan hak atas tanah adat cenderung memiliki pandangan yang beragam. Meskipun ada beberapa masyarakat adat menolak sawit, kelompok lain cukup tertarik untuk mengintegrasikan komoditas sawit sebagai bagian dari perekonomian mereka. Oleh karena itu, perlawanan masyarakat adat terhadap sawit seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai keinginan untuk mempertahankan gaya hidup tradisional semata, akan tetapi juga tentang “perjuangan agar turut terlibat dan ketentuan mengenai bagaimana harusnya masyarakat dilibatkan.” (Eilenberg 2015: 149)

Di garda terdepan, masyarakat adat dan setempat sering berkonflik dengan perusahaan demi merebut kembali tanahnya atau menghentikan operasi perusahaan. Contohnya bisa dilihat di Kinipan, Kalimantan Tengah, dimana konflik antara masyarakat adat Dayak dengan perusahaan sawit berujung pada penangkapan ketua adatnya, Effendi Buhing (Bernie 2020). Kasus Kinipan juga menjadi contoh bagi terjalannya aliansi antara masyarakat adat, hak atas tanah dan kelompok lingkungan seperti Walhi, AMAN dan Konsorsium Pembaruan Agraria yang semuanya ikut mendukung kasus tersebut.

Ada banyak contoh perdebatan yang terjadi antara lingkungan versus buruh di industri sawit Indonesia dan

Malaysia. Berbeda dengan masyarakat adat dan lokal yang menggantungkan hidup pada hutan dan lahan, banyak pekerja sawit yang hidup terisolasi di kawasan perkebunan dengan kondisi yang buruk. Akibat terbatasnya alternatif mata pencaharian, mereka pada akhirnya terpaksa bergantung pada perkebunan sawit untuk kelangsungan hidupnya.

Ketergantungan yang menjadi dasar ikatan antara pekerja dengan perusahaan inilah yang sesungguhnya menjadi alasan utama pekerja yang merasa terancam ketika menghadapi tuntutan kelompok pendukung lingkungan hidup dan masyarakat lokal. Kerentanan ini juga yang tampaknya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menempatkan pekerja di garis depan untuk menghadapi kelompok-kelompok masyarakat lokal yang melawannya, sehingga terciptalah konflik horizontal antara pekerja dan masyarakat adat setempat.

Dalam kasus Kinipan, saat berlangsungnya pertemuan mediasi yang digelar oleh Kantor Staf Kepresidenan, perusahaan sawit PT Sawit Mandiri Lestari menghadirkan 20 orang pekerja sawit. Para pekerja ini dulunya adalah warga Kinipan tetapi kini tidak lagi tinggal di desa tersebut. Hal ini menimbulkan konflik di dalam masyarakat sendiri, yakni antara mereka yang menentang dan yang dipekerjakan dalam pembangunan perkebunan.

Perlu diketahui bahwa pekerja sawit berasal dari beragam latar belakang. Mereka bisa berstatus petani warga setempat atau petani tak bertanah, transmigran atau buruh migran, atau dari keluarga kelas pekerja setempat. Di Indonesia, jumlah pekerja transmigran yang berasal dari Sulawesi Selatan, NTT dan Nias serta transmigran Jawa biasanya melebihi tenaga kerja lokalnya. Di Malaysia, lebih dari 80% pekerja perkebunan adalah pekerja asing, terutama dari Indonesia.

Beragamnya pengalaman dan hubungan buruh dengan tanah dan masyarakat setempat ini membentuk perspektif pekerja dengan cara yang berbeda-beda dan rumit. Pekerja tidak hanya terasingkan dari tanahnya, akan tetapi juga dari masyarakat adat setempat. Fakta bahwa pekerja hidup terisolasi di fasilitas-fasilitas perumahan dalam perkebunan membatasi interaksi sosialnya dengan masyarakat yang tinggal di pinggiran perkebunan. Padahal interaksi ini penting untuk membangun rasa solidaritas. Pekerja juga terpecah-pecah di antara sesamanya dan seringkali mengutamakan kelompok etnis sendiri.

Inilah alasan mengapa pekerja cenderung berpihak pada perusahaan ketika terjadi konflik tanah dengan masyarakat – atau ketika merespon kritik tentang perusahaan lingkungan. Bagi pekerja, kehilangan pekerjaan – yang merupakan alasan utama mereka bermigrasi – sama artinya dengan pulang ke kampung halaman



Perkebunan alamiah yang dirawat oleh masyarakat adat dapat menjadi model sistem agroforestri yang menempatkan sawit ke dalam lanskap mosaik. Perkebunan alamiah di Kalimantan Timur, Indonesia (Gambar: Michaela Haug)

mereka jauh, dimata mereka tidak memiliki sarana untuk bertahan hidup di kampung halaman itu sendiri.

Perusahaan mencoba untuk membajak pekerja dan serikatnya ke dalam narasi yang mereka gunakan untuk mendiskreditkan tuntutan masyarakat atas tanah dan aktivis lingkungan, dengan menggambarkan bahwa LSM melakukan 'kampanye hitam' melawan industri Indonesia dengan dukungan kekuatan asing.

Sebagai contoh, dalam menanggapi serangkaian aksi langsung Greenpeace terhadap minyak sawit 'kotor' pada 2018, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumatera Selatan mengeluarkan pernyataan bersama yang melibatkan tiga serikat pekerja yang mengutuk aksi tersebut sebagai 'kampanye hitam' yang mengancam kehidupan 17,5 juta pekerja sawit (Amri 2018).²

² Salah satu serikat pekerja (KASBI) kemudian menarik namanya dari pernyataan tersebut. Sikap keberpihakan kepada industri yang serupa oleh serikat pekerja juga terjadi di industri *pulp* dan kertas. Contohnya adalah pekerja perkebunan pulp industri di Riau yang membela PT Riau Andalas Pulp and Paper peraturan baru di bidang lingkungan mengatur pengurangan luas konsesi perusahaan yang

Propaganda pengusaha yang tampak amat terkoordinasi dengan peliputan media yang luas ini mengesankan adanya perpecahan antar kelompok akar rumput yang lebih besar daripada yang sebenarnya di lapangan.

Disisi lain, masih ada pula kasus-kasus solidaritas yang di dalamnya mempertemukan pekerja, masyarakat setempat dan pendukung lingkungan hidup (Karakoro 2020). Meskipun pekerja dan masyarakat adat mungkin memiliki kepentingan langsung yang saling bertentangan (mempertahankan pekerjaan vs. kepemilikan tanah), keduanya memiliki kondisi struktural yang sama, yakni terasing dari tanah tempat mereka tinggal.

beroperasi di kawasan lahan gambut yang rawan kebakaran dan kaya akan karbon. Berdasarkan pernyataan dari serikat pekerja, mata pencaharian mereka dipertaruhkan dan pemangkasan luas konsesi akan berakibat pada PHK masal. Koalisi serikat pekerja juga turut mempertahankan perkebunan pulp industri Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara ketika menghadapi tuntutan masyarakat adat untuk menutup perusahaan dikarenakan adanya persoalan-persoalan perampasan lahan dan pencemaran lingkungan (Arumingtyas 2017; Indriani and Susanti 2017; Pemerintah Provinsi Riau 2017; Anon 2015; Diputri 2015).



Teknik tumpang sari dapat menjadi satu elemen lanskap perkebunan sawit yang berkelanjutan. Jaha dan ternak ayam di bawah pepohonan sawit (pagar dipasang untuk melindungi tanaman jaha dari ternak ayam), Sarawak, Malaysia (Gambar: Lukas Kliewe)

Pekerja, termasuk pekerja migran, adalah mereka yang telah lama dirampas tanahnya dan tidak punya apa-apa lagi selain keringat mereka sendiri untuk dijual. Di sisi lain, masyarakat adat berpotensi menjadi pekerja tak bertanah jika tanah mereka dirampas perusahaan, baik melalui paksaan ataupun pengelabuan. Dalam banyak kasus, warga setempat juga bekerja untuk perusahaan.

Dalam kasus Jambi (Yayasan Keadilan Rakyat), petani yang baru-baru ini dirampas tanahnya dan dipaksa mencari nafkah dengan bekerja sebagai pekerja harian di kebun orang lain perkebunan yang dikelola industri jauh lebih bersimpati pada masyarakat setempat yang memperjuangkan tanahnya.

Di Desa Pondok Damar, Provinsi Kalimantan Tengah, masyarakat setempat yang beraliansi dengan para pekerja berhasil merebut kembali tanah mereka dari perusahaan pada tahun 2017. Kemenangan ini dapat diraih karena mayoritas pekerja adalah warga masyarakat Desa Pondok Damar yang memiliki akar sejarah dan hubungan yang sama dengan tanah tersebut. Di Isulan, Provinsi Sultan Kudarat, Filipina, para pekerja dan petani juga berhasil melakukan tindakan serupa untuk merebut kembali tanah masyarakat.

Transformasi sosial yang terjadi di kawasan perkebunan sawit menciptakan identitas yang saling bersinggungan dan cair antara masyarakat adat, petani dan pekerja. Sebagai contoh, masyarakat adat dan petani setempat sering dipekerjakan di perkebunan dan dijanjikan mendapatkan kebun plasma sebagai imbalan penyerahan hak atas tanahnya kepada perusahaan. Pekerja minyak sawit yang berstatus sementara sering mencari pekerjaan di lahan petani di sekitar perkebunan demi penghasilan tambahan. Ada banyak pekerja migran asing di kebun sawit yang dulunya juga petani.

Identitas-identitas semacam ini tidak terlalu sesuai untuk masuk dalam satu kategori. Dalam beberapa kasus, seorang pekerja adalah juga sekaligus masyarakat adat dan petani, dan sebaliknya. Pemusatan dampak yang dirasakan bersama akibat pembangunan perkebunan di kalangan masyarakat pedesaan akan menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi konflik, baik yang hanya dirasakan maupun yang nyata-nyata terjadi, yang ditimbulkan oleh dominasi industri sawit selama berpuluh tahun lamanya serta membangun visi bersama yang adil untuk masa depan.



Pestisida adalah salah satu masalah lingkungan terbesar dari produksi minyak sawit dan juga berdampak serius pada kesehatan perempuan yang dipekerjakan untuk menyemprot pestisida dengan upah rendah dan status kerja tidak menentu. Pekerja menyiapkan pestisida di Sumatera Utara, Indonesia (Gambar: Kartika Manurung)

4. Bentang Alam Mosaik (Kebun-Kebun Kecil) sebagai Visi Transformatif untuk Industri Sawit – Hak atas Lahan dan Ekologi

Di antara sekian banyak dampak lingkungan dan sosial yang paling merugikan dari kegiatan industri sawit, ada beberapa yang diakibatkan oleh begitu banyaknya tumbuhan sawit yang dibudidayakan oleh perusahaan nasional dan transnasional dalam perkebunan monokultur skala besar. Cara pandang yang digunakan dalam hal ini tentunya adalah pemaksimalan keuntungan secara jangka pendek yang disertai dengan pengabaian permasalahan ekologi dan sosial serta biaya jangka panjang yang muncul sebagai akibatnya.

Sebagai alternatif dari keadaan *status quo* saat ini, kami merumuskan masa depan sawit yang berdasarkan atas lanskap mosaik berbasis hak, di mana hal ini akan lebih berkelanjutan secara ekologis, menghormati hak-hak masyarakat, dikembangkan tanpa menghilangkan kepemilikan tanah oleh masyarakat setempat, dan menyediakan ruang bagi beragam ekonomi petani, dan di mana sawit dibudidayakan di antara tanaman-

tanaman komoditas lain dan menciptakan alternatif mata pencaharian.

Apa yang dimaksud dengan bentang alam mosaik?

Ada banyak kelompok masyarakat adat dan petani lokal yang menghuni dataran tinggi berhutan dan kawasan-kawasan pedalaman di pulau-pulau Indonesia. Mereka telah melestarikan hutan dan mempraktikkan mata pencaharian berkelanjutan. Hal ini dicirikan dengan beragam portofolio ekonomi yang meliputi pertanian subsisten, produksi tanaman komersial, peternakan, agroforestri, dan pengumpulan sumber daya hutan yang tumbuh liar.

Hasil dari diversifikasi ekonomi ini adalah lanskap yang mirip mosaik (pecahan), yang terdiri dari ladang, kebun skala kecil, taman hutan, pertumbuhan sekunder tanaman dari berbagai usia dan perlindungan hutan primer yang tersisa. Pengakuan atas tanah masyarakat adat dan penduduk setempat serta hak pengelolaan sangat penting untuk mencapai lanskap mosaik.

Apa manfaatnya bagi lingkungan?

Suatu lanskap mosaik terdiri dari kawasan-kawasan budidaya intensif dan unsur-unsur (semi-) alami, seperti

petak hutan sekunder atau primer yang tersisa. Unsur-unsur (semi-) alami ini, bahkan jika hanya merupakan sebagian kecil saja dari total luas kawasan, seringkali menyediakan habitat bagi sebagian besar keanekaragaman hayati lanskap tersebut.

Keanekaragaman tanaman pada bentang alam mosaik mendukung keanekaragaman hayati, sementara kanopi yang lebih rapat mencegah pengeringan tanah. Selanjutnya, teknik tumpang sari dan pertanian organik dapat membantu mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia (herbisida, pestisida dan pupuk). Bentang alam mosaik juga dapat mencegah terjadinya penebangan habis di bagian kawasan hutan yang luas dan justru menyertakan pola budidaya bergilir.

Berbekal pengetahuan ekologi tradisional yang dimilikinya, masyarakat adat dan penduduk setempat telah melestarikan hutan, keanekaragaman hayati dan karbon yang tersimpan di pepohonan secara efektif. Bentang alam mosaik berbasis hak dengan pengakuan formal atas hak atas tanah mereka memastikan kelanjutan perlindungan hutan.

Apa manfaat hal ini bagi masyarakat adat?

Masyarakat adat meraih manfaat dari lanskap mosaik karena sesuai dengan pola tradisional penggunaan lahan dan hutan yang telah lama diterapkannya. Dengan cara ini, terjadi perampasan dan pemindahan untuk pembangunan perkebunan skala besar tidak akan. Sebaliknya, hak adat akan diakui dan masyarakat adat akan memiliki

Tabel 1. Potensi Sinergi yang dapat dicapai antara Keadilan Lingkungan dan Pekerja dari Perspektif Transisi yang Adil

Patokan Utama dalam Bidang Lingkungan	Kemungkinan Posisi Pekerja
1. Menghentikan ekspansi lebih lanjut (Deforestasi, Lahan Gambut, Keanekaragaman Hayati)	Penghentian ekspansi lebih lanjut dapat berarti mengurangi pekerjaan di masa yang akan datang, tetapi tidak ada pengurangan untuk pekerja saat ini. Potensi kehilangan pekerjaan secara keseluruhan dapat diatasi dengan pengurangan jam kerja di seluruh industri.
2. Lanskap mosaik yang menggantikan monokultur skala besar	Lanskap mosaik akan jauh lebih padat karya dan akan membutuhkan pekerjaan yang lebih terampil. Kelompok petani dapat bekerja dengan mereka yang sebelumnya dipekerjakan sebagai buruh/pekerja perkebunan perusahaan. Bentuk kerja sama petani dan mantan buruh ini dapat mendorong transisi dari pekerja upahan ke petani pemilik lahan.
3. Perlindungan bagi hak masyarakat adat atas lahan dan mata pencaharian mereka	Perampangan untuk mencapai lanskap mosaik dapat mengembalikan tanah-tanah yang diklaim oleh masyarakat adat sekaligus menyediakan pekerjaan pengelolaan lahan dengan keterampilan tinggi bagi para pekerja. Dalam pemecahan perkebunan perusahaan secara lebih radikal, pekerja harus disertakan menjadi penerima manfaat dari reforma agraria dalam lanskap mosaik pasca perkebunan.
4. Pupuk organik yang menggantikan pupuk kimia NPCO	Sifat dari transisi menuju praktik lahan yang ekologis adalah lebih padat karya dan ini membutuhkan para pekerja yang terampil. Bentuk transisi ini dapat dimasukkan sebagai salah satu tuntutan serikat pekerja yang meminta penyediaan lebih banyak pekerjaan permanen dan mengakui pekerjaan perawatan sebagai pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi dan permanen.
5. Manajemen Hama Terpadu (<i>Integrated Pest Management</i>) yang menggantikan penggunaan herbisida dan pestisida, di mana hal ini penting bagi keanekaragaman hayati dan kesehatan	Karena penggunaan herbisida telah terbukti berdampak pada kesehatan pada pekerja perempuan, maka hal ini harus menjadi tuntutan utama di serikat pekerja. Manajemen Hama Terpadu membutuhkan pekerjaan permanen yang lebih terampil dan dengan upah yang lebih baik bagi perempuan yang saat ini dieksploitasi dalam kontrak harian yang statusnya tidak menentu.
6. Pengolahan Limbah Cair PKS (<i>Palm Oil Mill Effluent/POME</i>) menjadi metana dan pupuk organik (model produksi sirkuler) sebagai langkah penting dalam mencapai netralitas karbon	Pengenalan model produksi sirkuler untuk industri minyak sawit membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi. Serikat pekerja harus menuntut dilakukannya hal ini secara proaktif, disertai dengan kursus pelatihan kerja yang dihitung sebagai kerja dibayar.
7. Produksi yang lebih rendah secara umum untuk mencapai produksi yang lebih lestari (contohnya tanpa bahan bakar nabati)	Dari perspektif pekerja, pertumbuhan volume secara tidak terbatas adalah kontraproduktif, yang menyebabkan terjadinya krisis di mana produksi menjadi berlebih sehingga harganya jatuh. Volume yang lebih kecil dan disertai dengan produksi yang sifatnya lebih padat karya (lebih banyak pekerjaan untuk setiap ton CPO yang diproduksi) adalah posisi yang menguntungkan bagi pekerja.

kesempatan untuk memasukkan sawit ke dalam berbagai aset/portofolio ekonominya.

Hal ini akan menyelamatkan masyarakat adat agar tidak menjadi pekerja upahan yang hidup dengan ketergantungan dan, sebaliknya, membuat mereka mampu tetap menjadi petani swadaya. Bentang alam mosaik tidak hanya akan mendukung nilai-nilai lokal kemandirian hidup (*self determination*), akan tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan.

Apa manfaat hal ini bagi petani pemilik lahan?

Sekitar 40% sawit di Indonesia dibudidayakan oleh petani, baik sebagai peserta dalam berbagai skema petani (yang lebih atau kurang menguntungkan) atau sebagai produsen mandiri (Li 2015: 2). Kepemilikan lahan sawit oleh petani secara resmi didefinisikan sebagai kepemilikan tanaman komersial yang dilakukan di atas lahan dengan luas di bawah angka yang diwajibkan untuk memiliki izin usaha perkebunan, yakni 25 hektar (Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.1401.2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan).

Akan tetapi ukuran plot standar yang dialokasikan untuk satu KK di bawah sebagian besar skema petani sawit yang mengikat adalah 2 hektar. Tanpa sumber pendapatan tambahan, sulit bagi petani untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya dengan 2 hektar kebun sawit. Selain itu, persyaratan di banyak skema petani yang sangat tidaklah menguntungkan sehingga petani akhirnya memiliki tumpukan utang yang hampir tidak dapat mereka lunasi.

Oleh karena itu, lanskap mosaik yang kami usung didasarkan pada kepemilikan kebun plasma sawit mandiri (bukan berskema petani terikat dengan perkebunan). Masyarakat akan memiliki keuntungan ekonomi dari diversifikasi dan keuntungan dari ketahanan ekonomi yang tercipta. Mereka tidak bergantung hanya pada satu jenis tanaman saja sehingga akan lebih mampu mengimbangi perubahan harga dan permintaan yang ada, di samping juga menanam tanaman pangan untuk konsumsi sendiri.

Keuntungan jangka pendek vs. manfaat jangka panjang

Pendukung model perkebunan industrial tentu akan merasa terganggu dengan adanya fakta bahwa produksi sawit dalam lanskap mosaik ini jauh lebih tidak menguntungkan sistem monokultur. Mengingat adanya krisis produksi berlebih di industri saat ini, strategi yang hanya berfokus pada hasil yang lebih tinggi per hektar adalah pandangan yang sempit.

Pendekatan lanskap mosaik beserta diversifikasi ekonominya mengikuti berbagai nilai yang ada dan mempertimbangkan berbagai ukuran pula. Diversifikasi portofolio ekonomi akan memberikan pendapatan yang stabil dan berketahanan bagi petani mandiri yang memiliki

tanah sendiri, sehingga akan menghindari terciptanya penambahan populasi petani yang tidak memiliki lahan.

Di masa yang akan datang, hal ini juga akan mengurangi biaya-biaya yang timbul dari perubahan iklim dan degradasi lingkungan serta mendukung ketahanan pangan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Fungsi sosial dan ekologis ini tidak dapat diukur semuanya melalui istilah moneter. Akan tetapi jelas terlihat bahwa bahkan jika petani memproduksi sawit dalam jumlah yang lebih sedikit secara keseluruhan, petani memiliki nilai yang mutlak sangat diperlukan untuk masa depan Indonesia.

Jalan menuju lanskap mosaik

Meskipun lanskap mosaik sejalan dengan tuntutan masyarakat adat dan gerakan keadilan lingkungan akan pengakuan hak atas tanah dan konservasi berbasis hak, masih diperlukan lebih banyak diskusi tentang bagaimana cara menjadikannya sebagai ide yang menarik bagi pekerja.

Reforma agraria yang memecah skema monokultur skala besar dan mengembalikan kawasan konsesi kepada pemilik tanah setempat dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara signifikan.

Bagaimana cara model lanskap mosaik ini nantinya dalam menyerap pekerja? Sanggupkah model ini memberikan mata pencaharian alternatif bagi pekerja?

Salah **satu kemungkinannya** adalah memasukkan pekerja sebagai pihak yang menerima redistribusi lahan dari kawasan perkebunan sehingga menjadikan mereka sebagai petani sawit yang dapat melakukan diversifikasi tanaman dalam jangka panjang.

Kemungkinan lainnya adalah perampingan dan restrukturisasi pengelolaan perkebunan yang ada saat ini menjadi lanskap mosaik dan mengubah model dampak ekologi dan sosial yang tidak sanggup diatasi oleh model monokultur saat ini. Pekerja akan tetap bekerja di perusahaan sawit, akan tetapi mereka akan mengelola beragam lanskap berupa unit kecil agroforestri sawit (lihat di bawah). Tetapi struktur kepemilikan juga dapat diajak untuk mengalihkan perkebunan atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menjadi koperasi.

Meninggalkan ekonomi perkebunan secara total dan beralih ke ekonomi rendah karbon dapat menjadi **pilihan ketiga**. Pekerja dapat dilatih dan dipekerjakan dalam konservasi dan pemulihan/restorasi berbasis masyarakat dengan menawarkan pekerjaan jangka panjang dan jaminan sosial. Pekerja yang berasal dari masyarakat yang bergantung pada hutan sudah memiliki pengetahuan dan keahlian ekologi untuk ditawarkan, di mana hal ini sebelumnya tidak dihargai.



Limbah Pabrik Kelapa Sawit dapat digunakan untuk menghasilkan biogas dan pupuk organik. Kubangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Palm Oil Mill Effluent (POME) di Sabah, Malaysia (Gambar: Oliver Pye)

Cara-cara yang dapat dilakukan ini bisa dilakukan secara sekaligus. Pada akhirnya, cara-cara ini perlu dijelajahi oleh para buruh dan dalam interaksinya dengan Masyarakat Adat dan gerakan keadilan lingkungan. Lanskap mosaik perlu menawarkan cara yang jelas untuk keadilan sosial dan ekonomi sehingga pekerja tidak lagi mengalami eksploitasi dalam visi yang baru.

5. Bentang Alam Mosaik sebagai Visi Transformatif bagi Industri Sawit – Hak Pekerja dan Keadilan Sosial

Karena dihadapkan pada tuntutan dari masyarakat adat dan gerakan keadilan lingkungan, beberapa perusahaan sawit besar menanggapi dengan membentuk skema sertifikasi RSPO dan inisiatif serupa yang menangani masalah *branding*. Namun skema ini tetapi tidak mengubah model dasar bisnis yang merusak.

Terkait indikator utama kelestarian lingkungan, seperti penghentian ekspansi lebih lanjut, alternatif untuk monokultur berskala besar, strategi untuk produksi netral karbon, atau penghentian penggunaan pestisida, perusahaan-perusahaan cenderung memilih tetap diam, bimbang atau sepenuhnya menentang (Pye 2016).

Posisi perusahaan tersebut didasari alasan-alasan bahwa setiap orang yang dipekerjakan di sektor ini berada dalam posisi kepentingan yang sama dengan perusahaan – mempertahankan bisnis dan lapangan pekerjaan, Perusahaan berusaha untuk menarik perwakilan tenaga kerja dan pekerja untuk menentang peraturan-peraturan lingkungan, misalnya dalam upaya mencegah berlakunya undang-undang yang lebih ketat tentang subsidi bahan bakar nabati di Uni Eropa.

Namun dari perspektif perburuhan, pekerja dan pihak manajemen/pemilik berdiri pada posisi yang justru bertolak belakang. Perusahaan tidak hanya mengatur pekerja dan menentukan kondisi kerja, akan tetapi juga ekstraksi dan penggunaan sumber daya alam, sehingga ini berarti ekstraksi lingkungan. Kekuatan korporasi untuk menjalankan kepentingannya (memaksimalkan keuntungan, akumulasi, menekan biaya produksi, dan bersaing di pasar global) telah mendorong terjadinya kesenjangan antara kebutuhan lingkungan dan pekerja.

Meskipun pada faktanya, alam dan pekerja sama-sama dieksploitasi oleh kapital. Pihak manajemen dan pemilik perusahaan bertanggung jawab langsung atas upah rendah di sektor ini, kondisi kerja dan kontrak yang tidak menentu, upah borongan yang memaksa pekerja untuk mengikutsertakan anggota keluarganya ke dalam pekerjaan perkebunan, lingkungan kerja yang tidak sehat, dll.



Pekerja mempunyai kemampuan dan potensi untuk menjaga pengelola lanskap kelapa sawit yang berkelanjutan. Perempuan pekerja perawatan menabur pupuk di perkebunan milik PT. London Sumatra plantation, Sumatera Utara, Indonesia (Gambar: RAN/OPPUK/Nanang Sujana)

Jika kepentingan pekerja dan modal sangat berbeda dalam persoalan-persoalan sosial, maka apakah pekerja mempunyai kepentingan yang berbeda persoalan lingkungan? Menurut kami, kepentingan pekerja dan modal bekerja mengikuti logika yang sama sekali berbeda.

Walaupun tujuan utama industri sawit adalah meningkatkan keuntungan sehingga terjadi kenaikan terus menerus pada volume sawit, para pekerja terutama berkepentingan pada reproduksi sosialnya, yaitu upah hidup layak dan jaminan tetap bekerja agar dapat menghidupi orang-orang yang mereka cintai.

Selain itu, dampak perubahan iklim pada sektor perkebunan mungkin akan membuat pekerja tidak dapat menghindari terjadinya transisi bagi pekerja perkebunan. Hal ini lantaran suhu ekstrem akan menjadikan pekerja perkebunan sebagai kelompok yang berisiko tinggi terhadap paparan stres akibat panas (*heat stress*) yang akan memperburuk keadaan yang sudah tidak setara dan perpindahan posisi yang terjadi (ILO 2019).

Yang menjadi kekhawatiran utama bagi pekerja adalah bahwa peraturan yang lebih ketat yang dikenakan pada industri sawit atau perampingan industri dapat menyebabkan PHK. Kekhawatiran lainnya adalah beban kerja yang mereka hadapi, yang saat ini sudah terlalu berat, bisa menjadi lebih berat. Sementara, masih banyak

persoalan yang belum terselesaikan, dimulai dari upah layak yang belum terselesaikan dalam mode produksi yang saat ini tidak berkelanjutan.

Bisakah perspektif bentang alam mosaik memberikan solusi? Bagaimana caranya agar tuntutan-tuntutan ekologis yang utama dapat diselaraskan dengan kepentingan pekerja? Dan perbaikan sosial apa yang perlu dimasukkan dalam perspektif transformasi sosial-ekologis?

Tabel berikut ini merangkum beberapa persoalan dan potensi sinergi antara posisi para pendukung lingkungan dan kemungkinan tanggapan oleh tenaga kerja dalam hal ini.

Jika kita menyoroti dua pertentangan paling menonjol antara gerakan keadilan lingkungan dan gerakan buruh, yaitu antara penghentian ekspansi perkebunan dan upah hidup layak, maka kita akan dapat langsung melihat hubungan antara dua tuntutan ini.

Semakin tinggi upah pekerja, akan semakin sedikit keuntungan teramat besar yang bisa dihasilkan di industri. Modal akan mengalir masuk ke perkebunan baru karena perkebunan tersebut memiliki tingkat pengembalian modal yang begitu tinggi. Jika dikurangi dan dibuat lebih sesuai kewajaran melalui upah yang jauh lebih tinggi,

maka ini akan mengurangi beberapa tekanan investasi yang mendorong pembukaan lebih banyak lahan dan hutan untuk pengembangan sawit.

Akan tetapi bagaimana dengan undang-undang yang menghambat izin pembukaan lahan perkebunan baru? Bukankah ini akan mencegah terciptanya lapangan kerja baru?

Dari perspektif buruh, mempertahankan pekerjaan yang ada saat ini perlu lebih diprioritaskan daripada potensi pekerjaan baru. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi serikat pekerja untuk mendukung perluasan perkebunan baru sebelum perkebunan tersebut didirikan.

Pada saat yang sama, hilangnya potensi pekerjaan yang diciptakan oleh perluasan lahan perkebunan dapat dikompensasikan dengan model bisnis yang didasarkan pada rasio pekerja per hektar yang lebih tinggi (lebih banyak pekerja yang direkrut per satu hektar). Rasio yang lebih besar ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi pencaharian

masyarakat lokal. Di sinilah model mosaik berperan sebagai elemen kunci dalam transformasi sosial-ekologis.

Produksi lanskap mosaik yang dipahami sebagai perubahan pengelolaan perkebunan untuk mencapai unit-unit agroforestri berukuran kecil sama artinya dengan merekrut lebih banyak pekerja per hektar. Dalam hal ini tidak hanya keekonomian skala (*economies of scale*) akan berkurang. Berkurangnya produktivitas pekerja akan justru diikuti dengan semakin produktifnya lahan.

Dalam kata lain, bekerja di perkebunan-perkebunan yang lebih kecil di kawasan yang lebih luas untuk areal dengan luasan yang sama juga berarti waktu perjalanan menuju tempat kerja yang lebih lama, lebih banyak koordinasi yang dibutuhkan, tambahan pembagian tugas, dll.

Dengan cara produksi yang menggunakan lanskap mosaik, akan ada lebih banyak pekerjaan per hektarnya serta lebih banyak pekerjaan per ton CPO. Perusahaan-perusahaan sawit mencoba meningkatkan skala ekonomi



Perspektif buruh terkait Transisi yang Adil dapat berangkat dari cara pandang buruh itu sendiri. Pekerja memanen buah sawit di perkebunan milik PT. London Sumatra, Deli Serdang. North Sumatera Utara (Gambar: RAN/OPPUK/Nanang Sujana)

dan produktivitas pekerja secara permanen agar tetap kompetitif. Pekerja cenderung menolak dorongan produktivitas. Sementara tahap-tahap untuk mencapai produksi mosaik untuk keseluruhan industri akan melampaui kebutuhan kompetitif industri.

Perspektif serupa dapat dikembangkan untuk Manajemen Hama Terpadu serta produksi dan penggunaan pupuk organik untuk menggantikan pupuk kimia. Pertama-tama, penggunaan pestisida dikurangi untuk kepentingan pekerja, terutama pekerja perempuan yang cenderung dipekerjakan pada bagian perawatan dan mengalami banyak masalah kesehatan.

Pengurangan bahan kimia akan lebih mungkin dilakukan dalam lanskap mosaik yang memiliki lebih banyak keanekaragaman hayati, serangga, dan proses pemeriksaan dan penyeimbangan (*check and balance*) yang alamiah terhadap hama yang hidup dari sawit. Sisa Limbah Cair PKS (POME) dari proses penggilingan adalah sumber pupuk organik yang sempurna. Bahan-bahan ini harus

dikumpulkan dan diolah oleh pekerja dalam operasi biogas.

Setelah siap, jika dikombinasikan dengan hasil parutan pelepah sawit, bahan-bahan ini akan menjadi mulsa/sersah³ yang sangat baik untuk disebar di sekitar pohon sawit. Tidak hanya dapat menyuburkannya, mulsa juga dapat untuk menekan hama rumput yang akan mengurangi kebutuhan akan herbisida.

Semua ini membutuhkan lebih banyak pekerjaan dan keterampilan. Jenis pekerjaan ini membutuhkan pekerja yang terampil sebagai pengelola lahan dengan status kerja permanen, dan bukan pekerja yang hanya menjalankan tugas monoton yang sama setiap hari dengan upah

- 3 Mulsa adalah semua bahan yang digunakan pada permukaan tanah terutama untuk menghalangi hilangnya air karena penguapan atau untuk mematikan tanaman pengganggu. Mulsa sering juga disebut sersah. Sersah sudah terbukti efektif sekali untuk mengurangi penguapan dan menghindari tumbuhnya tanaman pengganggu, tetapi pada umumnya tidak dapat digunakan pada tanaman yang memerlukan pengolahan tanah susulan.



Buruh yang terorganisir dapat menjadi kekuatan dalam mendorong Transisi yang Adil di Industri Sawit. Anggota Serikat Pekerja Nasional mengadakan aksi protes terhadap Omnibus Law di Indonesia, 2020 (Gambar: SPN 2020)



Perspektif Transisi yang Adil akan menggabungkan keberlangsungan lingkungan dan keadilan sosial. Helm pekerja dan tandan buah sawit, Sumatera Utara, Indonesia (Gambar: RAN/OPPUK/Nanang Sujana)

minimum atau upah borongan yang tidak realistis. Idealnya, hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan siklus ekologi dan kebutuhan lingkungan.

Terakhir, pertanyaan tentang semakin banyaknya produksi minyak sawit adalah hal yang penting. Konsep ini tertanam lekat dalam perspektif perusahaan (dan juga RSPO) karena semakin banyak penjualan berarti semakin banyak pula keuntungan yang akan didapatkan.

Namun dari perspektif ketenagakerjaan, belum tentu demikian halnya. Perluasan yang tidak dilakukan secara terkoordinasi telah menyebabkan krisis akibat produksi berlebih yang pada akhirnya menyebabkan jatuhnya harga global. Sementara itu, penurunan harga pasar selalu dijadikan alasan oleh perusahaan untuk tidak menaikkan atau bahkan memotong gaji. Pekerja pun memiliki kepentingan yang sama atas harga minyak sawit yang lebih tinggi dan kompetitif. Ini akan memberikan lebih banyak pekerjaan dan jaminan pendapatan dalam jangka panjang.

Sebagai perspektif jangka menengah, gerakan pekerja berkepentingan dalam mengubah pekerjaan-pekerjaan berupah rendah dengan status yang tidak menentu – yang sering disebut sebagai pekerjaan ‘tidak terampil’ atau ‘dengan sedikit keterampilan’ – agar menjadi pekerjaan dengan upah yang lebih baik dengan status permanen.

Transformasi sosial-ekologis terhadap industri sawit, yang dilakukan dengan memecah perkebunan monokultur besar menjadi kebun-kebun yang lebih kecil, merestorasi lahan gambut, menghubungkan kembali koridor hutan dan mengembalikan keadaan lanskap hutan ke keadaan semula, membutuhkan pekerja yang sudah terlatih dalam memahami lanskap secara ekologis, untuk menjadi pengelola lahan-lahan tersebut.

Yang dibutuhkan adalah pekerja terlatih yang diupah dengan layak dengan investasi jangka panjang untuk perawatan lingkungan. Tidak perlu lagi ada pekerja dieksploitasi dengan mencurahkan keringat dan jerih payahnya, atau pekerja yang terasing dari alam. Kita menghendaki pekerja yang dapat menyatu dengan alam, bekerja dengan mengikuti hukum alam dan kebutuhan kelestarian lingkungan

Transformasi perkebunan skala besar menjadi lanskap mosaik dapat dilakukan melalui dialog bersama masyarakat adat yang menghuni kawasan-kawasan sekitar perkebunan, yaitu memangkas luasnya dengan mengembalikan ke tangan para pemilik adat. Dari perspektif pekerja, kebutuhan transformasi ini akan dapat dipahami. **Pertama**, karena pekerja setempat memiliki akar di masyarakat tersebut, dan **kedua** karena di dalamnya akan terjadi peningkatan kelas pekerja dan upah untuk pekerjaan berketerampilan yang dilakukan dalam model pengelolaan (*stewardship*).

Cara yang dilakukan untuk mencapai lanskap mosaik melalui reforma agraria dan pemecahan perkebunan-perkebunan yang ada saat ini menjadi petak-petak kebun petani mungkin akan menarik bagi pekerja. Pada tahun 1950-an, Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI) pernah mendukung strategi ini dalam konteks pengambilalihan massal perkebunan saat itu dan mengklaim kembali lahan-lahan tersebut untuk produksi secara subsisten (Stoler, 1995).

6. Langkah-langkah menuju Perspektif Pekerja tentang Transisi yang Adil

Kita telah menyaksikan bagaimana perusahaan sawit menjadikan buruh hidup terisolasi dari masyarakat dan bergantung pada perusahaan sebagai alat untuk melawan petani adat atau para pendukung lingkungan. Konflik antara lapangan kerja dan lingkungan tampak tercipta akibat operasi industri sawit.

Kita juga telah menyaksikan beberapa contoh serikat pekerja sawit yang berdiri bersama bersama korporasi sawit untuk mempertahankan ekspansi perkebunan sawit tanpa hambatan. Gerakan buruh di industri sawit tidak memiliki posisi dan strategi independen ketika menghadapi tantangan yang berasal dari perusahaan lingkungan dan konflik lahan yang menjangkiti sektor industri ini secara keseluruhan.

Di saat yang bersamaan, kita juga telah menyaksikan bagaimana transformasi sosial ekologis terhadap industri sawit dapat menjadi ide yang menarik bagi pekerja dan serikat, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Namun gerakan buruh hanya dapat mengembangkan posisi tersebut melalui proses diskusi, edukasi dan pemikiran mendalam. Perspektif Transisi yang Adil bagi industri sawit perlu dikembangkan oleh pekerja sendiri. Keadilan lingkungan dan lembaga adat adalah sekutu utama yang dapat membantu memulai dan memfasilitasi

Perspektif pekerja untuk Transisi yang Adil tidak dapat hanya bersumber dari cara pandang pengurus serikat pekerja saja. Perspektif ini harus dimulai dari pengalaman lapangan para pekerja sawit. Oleh karena itu, langkah pertamanya adalah membentuk kelompok-kelompok diskusi bagi pekerja untuk membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lingkungan.

Diskusi-diskusi semacam ini dapat diawali dari permasalahan-permasalahan ekologis yang dialami pekerja dalam kesehariannya. Misalnya, dampak kesehatan yang muncul dari kegiatan panen, penyemprotan pestisida, penaburan pupuk, atau kurangnya air bersih.

Kemudian dapat diselenggarakan diskusi mengenai persoalan-persoalan terkait yang lebih luas, dengan didasarkan atas pengetahuan pekerja mengenai persoalan-persoalan yang sangat mendasar ini. Tujuannya juga untuk menunjukkan persepsi bahwa pekerja bukan tidak peduli atau mengetahui tentang kehilangan keanekaragaman hayati, polusi kabut asap, dsb.

Operasi bisnis yang merusak lingkungan oleh perusahaan akan mengakibatkan pencemaran terhadap sumber air masyarakat, mengusir masyarakat dari lahannya, dan membuat seluruh kawasan dalam kondisi tercemar atau kehilangan kesuburan. Kerusakan permanen ini nantinya akan membuat pekerja serta masyarakat pedesaan dan adat tidak akan memiliki sumber daya ketika perusahaan nantinya selesai beroperasi dan keluar dari kawasan-kawasan tertentu.

Langkah ketiga adalah memikirkan secara mendalam tuntutan-tuntutan terkait pekerjaan, yang berkaitan dengan transformasi ekologis industri ini (dalam hal upah, keterampilan, pelatihan, penyusunan perjanjian kerja bersama, kontrak, dsb.).

Upaya lainnya adalah mempertemukan kelompok-kelompok keadilan lingkungan dan serikat pekerja yang tertarik untuk mengikuti dan mempelajari ide soal transisi yang adil. Hal ini merupakan proses penting dalam membentuk 'aliansi merah-hijau' di industri sawit. Dengan membawa suara lantang pekerja dalam diskusi-diskusi ini, para aktivis akan dapat menghindari gaya bicara yang kurang menghormati pekerja dan dapat memanfaatkan pengalamannya yang luas di lapangan.

Transformasi yang Adil yang mengusung keadilan sosial dan kelestarian lingkungan harus ditanamkan dalam pikiran serikat pekerja dan pekerja itu sendiri melalui kegiatan yang saling mengedukasi, organisasi dan mobilisasi.

Setelah pekerja memikirkan mendalam mengenai situasi yang dihadapinya dan tuntutan masing-masing terkait persoalan-persoalan sosial ekologis di industri sawit, fase kedua adalah mempertemukan masyarakat adat, kelompok keadilan lingkungan dan pekerja untuk membahas bagaimana cara mengatasi perbedaan dan menyusun strategi bersama.

Melalui pertukaran pengalaman, pekerja mungkin akan dapat memahami kemarahan masyarakat ketika perusahaan merampas lahan mereka, yang mungkin berkaitan dengan sejarahnya sendiri di mana pekerja pun hidup tanpa memiliki lahan. Sementara di sisi lain, masyarakat setempat juga dapat memahami pertarungan besar yang ada di hadapan mata seorang pekerja manakala ia kehilangan pekerjaannya.

Dialog terus menerus antara kelompok-kelompok ini saat merumuskan titik temu kepentingan bersama akan mendorong tumbuhnya perasaan solidaritas dan landasan bagi gerakan menuju Transisi yang Adil.

Serangkaian diskusi di tingkat basis akar rumput di berbagai lokasi dan negara untuk memikirkan keberagaman konteks dan pengalaman yang dihadapi dapat memberikan dasar untuk membawa gagasan-gagasan untuk Transisi yang Adil di industri sawit ke tataran yang lebih umum dan luas.

Konferensi yang mempertemukan para pekerja dari kelompok diskusi tersebut dengan para tokoh serikat pekerja, aktivis keadilan lingkungan dan perwakilan masyarakat adat dapat membangun suatu kertas posisi untuk transformasi sosial ekologis di industri sawit. Hal ini kemudian dapat digunakan untuk membangun aliansi yang terdiri dari beberapa serikat pekerja, pemangku kepentingan, masyarakat adat dan pergerakan keadilan lingkungan di atas perspektif bersama.

Dalam jangka waktu menengah, aliansi adalah suatu kemungkinan yang realistis untuk dilakukan. Hal ini lantaran baik pekerja, masyarakat adat dan lingkungan merupakan korban dari perusahaan-perusahaan sawit transnasional yang sama. Pembukaan lahan dan perluasan perkebunan menghancurkan lingkungan dengan cara mengusir masyarakat dari tanahnya sendiri.

Para pekerja yang sudah tidak bertanah ini kemudian menjadi sasaran eksploitasi dalam bentuk kondisi kerja yang penuh dengan ketidakpastian. Pekerja tidak hanya terasing dari pekerjaannya, akan tetapi juga dari tanah yang mereka miliki. Persatuan di atas dasar kepemilikan lahan kolektif atau di seputar perspektif kedaulatan pangan adalah hal yang mungkin untuk dibentuk.

Pekerja dan masyarakat adat tidak hanya korban, melainkan juga entitas yang hidup di garis depan dalam menciptakan lanskap mosaik. Pada saat ini, baik pekerja perkebunan dan masyarakat setempat sangat tidak terorganisir dengan baik dan terpecah belah satu sama lain.

Untuk mengembangkan suatu strategi yang realistis untuk Transisi yang Adil, gerakan buruh pekerja perlu bersatu dan mengorganisir pekerja di seluruh industri sawit untuk membangun kekuatan. Dengan pekerja yang terorganisir, maka pekerja dapat mendorong perundingan perjanjian kerja bersama yang berlaku secara lintas negara dan mendorong perubahan sosial-ekologis dari industri itu sendiri.

Perdebatan mengenai Transisi yang Adil dan dialog bersama masyarakat lokal terkait persoalan-persoalan lingkungan

dan lahan dapat membantu upaya ini. Contohnya dengan membangun kesadaran politik, khususnya bagi para pekerja. Alasan tepat mengapa pekerja cenderung untuk lebih berfokus pada tuntutan normatif (dan mengabaikan tuntutan lingkungan) adalah karena satu-satunya cara yang cepat dan dapat dilakukan untuk bertahan hidup adalah dengan cara menjual keringat dan jasanya sebagai pekerja.

Pekerja dapat melampaui kepentingannya jika mampu memikirkan mendalam mengenai akar dari permasalahan yang mereka hadapi beserta potensi kekuatan yang mereka miliki untuk mengubah situasi tersebut. Dengan demikian, proses perenungan dan diskusi terhadap strategi Transisi yang Adil dapat menjadi cara untuk memberdayakan pekerja di industri sawit.

Pustaka:

- » Amnesty International (2016): *The Great Palm Oil Scandal. Labour Abuses Behind the Big Brand Names*. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5184/2016/en/>.
- » Amri, Qayuum (2018): *APINDO dan Tiga Serikat Buruh Sepakat Lawan Kampanye Hitam Sawit* <https://sawitindonesia.com/apindo-dan-tiga-serikat-buruh-sepakat-lawan-kampanye-hitam-sawit/>
- » Anon (2015): *SP/SB Tolak Penutupan Perusahaan*. <https://analisedaily.com/berita/arsip/2015/5/25/136540/spsb-tolak-penutupan-perusahaan/>
- » Arumingtyas, Lusia (2017): *Ketika RAPP Tak Patuhi Aturan Gambut, Siti: Jangan Ajak-ajak Pekerja dan Ancam PHK*. <https://www.mongabay.co.id/2017/10/23/ketika-rapp-tak-patuhi-aturan-gambut-siti-jangan-ajak-ajak-pekerja-dan-ancam-phk/>
- » Austin, Kemen, Amanda Schwantes, Yaofeng Gu, and Prasad Kasibhatla (2019): *What causes deforestation in Indonesia?* *Environmental Research Letters* 14 (2019), [<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaf6db>]
- » Barry, John (2013): *Trade unions and the transition away from 'actually existing unsustainability'*. In: Rätzzel, Nora and David Uzzel (2013): *Trade Unions in the Green Economy. Working for the Environment*. London and New York: Routledge, 227-240
- » Bernie, Mohammad (2020): *Kasus Effendi Buhing Terkait Pencaplokan Tanah Adat, Pak Mahfud*. <https://tirto.id/kasus-effendi-buhing-terkait-pencaplokan-tanah-adat-pak-mahfud-f3sg>
- » Campaign against Climate Change (2014): *One Million Climate Jobs. Tackling the Environmental and Economic Crises*. https://campaignccc.org/sites/data/files/Docs/one_million_climate_jobs_2014.pdf.
- » Colchester Marcus, Norman Jiwan, Andiko, Martua Sirait, Asep Firdaus, Surambo and Herbert Pane. (2006): *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*. Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme and Perkumpulan Sawit Watch.
- » DGB (2020): *The German Consensus on Coal. Successful Policies Towards a Just Transition*. Berlin: DGB.
- » Diputri, Caessaria Indra (2015): *APEBDAS-SU Tolak Penutupan Perusahaan di Sekitar Danau Toba*. <https://waspada.co.id/2015/05/apebdas-su-tolak-penutupan-perusahaan-di-sekitar-danau-toba/>

- » Dohong, Alue, Ammar Abdul Azizd, and Paul Darguscha (2018): Carbon Emissions from Oil Palm Development on Deep Peat Soil in Central Kalimantan Indonesia. *Anthropocene* 22, 31-39.
- » Eilenberg, Michael (2015): Shades of Green and REDD: Local and Global Contestations over the Value of Forest versus Plantation Development on the Indonesian Forest Frontier. *Asia Pacific Viewpoint* 56 (1): 48-61.
- » Elmhirst, Rebecca, Mia Siscawati, Bimbika Basnett and Dian Ekowati (2017): Gender and Generation in Engagements with Oil Palm in East Kalimantan, Indonesia: Insights from Feminist Political Ecology. *The Journal of Peasant Studies* 44 (6): 1135-1157.
- » Goldstein, Jenny (2015): Knowing the Subterranean: Land Grabbing, Oil Palm, and Divergent Expertise in Indonesia's Peat Soil. *Environment and Planning A* 48(4): 754-770.
- » Haug, Michaela (2014): Resistance, Ritual Purification and Mediation: Tracing a Dayak Community's Sixteen-Year Search for Justice in East Kalimantan. *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 15(4): 357-375.
- » ILO (2015): *Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
- » ILO (2019): *Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labour productivity and decent work*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_711919.pdf
- » Indonesian Palm Oil Board (2007): *Sustainable Oil Palm Plantation*. Jakarta: Indonesian Palm Oil Board.
- » Indriani, Citra and Reni Susanti (2017): *Ribuan Pekerja Tolak Regulasi Gambut*. <https://regional.kompas.com/read/2017/10/24/09190441/ribuan-pekerja-tolak-regulasi-gambut>.
- » Karokaro, Ayat Suheri (2013): *Organisasi Buruh dan Lingkungan Tolak Ekspansi Sawit di Indonesia*. <https://www.mongabay.co.id/2013/11/03/organisasi-buruh-dan-lingkungan-tolak-ekspansi-sawit-di-indonesia/>
- » Koh, Lian and David Wilcove (2008): Is Oil Palm Agriculture Really Destroying Tropical Biodiversity? *Conservation Letters* 1: 60-64.
- » Kohler, Brian (2010): Sustainability and Just Transition in the Energy Industries, in: Abramsky, Kolya (Ed.) *Sparking a Worldwide Energy Revolution: Social Struggles in the Transition to a Post-Petrol World*, Oakland: AK Press, pp. 569-76.
- » Li, Tania (2015): *Social Impacts of Oil Palm in Indonesia: A Gendered Perspective from West Kalimantan*. CIFOR Occasional Paper 124. Bogor: Center for International Forestry Research.
- » Li, Tania (2017): Intergenerational Displacement in Indonesia's Oil Palm Plantation Zone. *The Journal of Peasant Studies* 44(6): 1158-1176.
- » McCarthy, Joh n. (2010): Processes of Inclusion and Adverse Incorporation: Oil Palm and Agrarian Change in Sumatra, Indonesia. *Journal of Peasant Studies* 37(4): 821-850.
- » Meredith Burgmann, Verity Burgmann (2017): *Green Bans, Red Union: The saving of a city*. Sydney: New South Books.
- » OECD (2017): *Employment implications of green growth: Linking jobs, growth, and green policies*, <https://www.oecd.org/environment/Employment-Implications-of-Green-Growth-OECD-Report-G7-Environment-Ministers.pdf>.
- » Pemerintah Provinsi Riau (2017): *Permen LHK Ditolak, SPSI Riau Layangkan Gugatan Ke MA*. <http://www.mediatransnews.com/read-4853-2017-10-17-permen-lhk-ditolak-spsi-riau-layangkan-gugatan-ke-ma.html>.
- » Potter, Lesley (2009): Oil Palm and Resistance in West Kalimantan, Indonesia. In: *Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast Asia*, edited by Dominique Caouette and Sarah Turner, 105-134. London: Routledge.
- » Puder, Janina (2019): Excluding migrant labor from the Malaysian bioeconomy: Working and living conditions of migrant workers in the palm oil sector in Sabah, *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 12(1), pp. 31-48
- » Pye, Oliver (2016): Deconstructing the RSPO. The Round Table on Sustainable Palm Oil and the Palm Oil Industrial Complex, in: Cramb, Rob and John McCarthy (eds.): *The Oil Palm Complex: Agrarian Transformation, State Policy, and Environmental Change in Indonesia and Malaysia*. Singapore: NUS.
- » Pye, Oliver (2018): Commodifying sustainability: Development, nature and politics in the palm oil industry. *World Development* <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.02.014>.
- » Pye, Oliver, Ramlah Daud, Yuyun Harmono and Tatat (2012): Precarious Lives: Transnational Biographies of Migrant Oil Palm Workers. *Asia Pacific Viewpoint* 53(3): 330-342.
- » R  thzel, Nora; Cock, Jacky; Uzzell, David (2018): Beyond the nature-labour divide: trade union responses to climate change in South Africa, *Globalizations* 15(4), pp. 504-519.
- » Reijnders, Lucas and Mark Huijbregts (2008): Palm Oil and the Emission of Carbon-based Greenhouse Gases. *Journal of Cleaner Production* 16(4): 477-482.
- » Rist Lucy, Feintrenie Laurene and Levang Patrice (2010): The Livelihood Impacts of Oil Palm: Smallholders in Indonesia. *Biodiversity Conservation* 19 (4): 1009-1024.
- » Rival, Alain and Patrice Levang (2014): *Palms of Controversies. Oil Palm and Development Challenges*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- » Smith, Samantha (2017): *Just Transition. A Report for the OECD*, <https://www.oecd.org/environment/cc/g20-climate/collapsecontents/Just-Transition-Centre-report-just-transition.pdf>.
- » Stevis, Dimitris and Romain Felli (2015): Global labour unions and just transition to a green economy. *Int Environ Agreements (2015)* 15:29-43. DOI 10.1007/s10784-014-9266-1.
- » Stevis, Dimitris; Uzzell, David; R  thzel, Nora (2018): The labour-nature relationship: varieties of labour environmentalism, *Globalizations* 15(1):1-15.
- » Stoler, Ann (1995): *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979*. Ann Arbor.
- » Varkkey, Helena. 2015. *The Haze Problem in Southeast Asia: Palm Oil and Patronage*. London: Routledge.
- » View, Jenice L., 2002: *Just Transition Alliance. Frontline Workers and Fenceline Communities United for Justice*, Washington DC
- » Vijay, Varsha, Stuart Pimm, Clinton Jenkins and SJ Smith (2016): The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and Biodiversity Loss. *PLoS One*. 2016 Jul 27; 11(7): e0159668.
- » Wilcove, David and Lian Koh (2010): Addressing the Threats to Biodiversity from Oil Palm Agriculture. *Biodiversity Conservation* 19:999-1007.
- » World Growth (2011): *The Economic Benefits of Palm Oil to Indonesia*. Melbourne, Australia: World Growth.

Tentang Penerbit

Stiftung Asienhaus, organisasi yang berlandaskan pada prinsip „menghubungkan orang, memberikan pencerahan, merancang masa depan“ dan berkontribusi pada menjembatani kelompok sipil di Asia dan Eropa. Organisasi ini menjunjung prinsip hak asasi manusia, penguatan partisipasi sosial dan politik, dan juga perlindungan keadilan sosial dan lingkungan.

Sawit Watch adalah sebuah organisasi non pemerintah di Indonesia berbasis keanggotaan individu yang prihatin terhadap dampak-dampak negatif sistem perkebunan sawit. Sawit Watch dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat/lokal menuju keadilan ekologis.

Jaringan Solidaritas Buruh Sawit Transnasional (TPOLS), adalah jaringan yang terdiri dari serikat buruh, kelompok keadilan lingkungan dan perempuan yang bertujuan untuk membangun solidaritas transnasional antar pekerja di industri sawit. Solidaritas transnasional antara pekerja di berbagai negara dirajut dalam hubungan Jaringan Produksi Global. TPOLS bekerja menuju perubahan sosial-ekologis produksi minyak sawit yang adil.

AG Ressourcen, adalah kelompok kerja Asienhaus, yang bertujuan untuk mengimplementasikan proyek dan suatu kegiatan, menyiapkan publikasi dan menganalisis dan memperkuat jaringan dalam bidang sumber daya alam dan keadilan lingkungan.

Penerbit

V. i. S. d. P. :

Majid Lenz
Hohenzollernring 52
50672 Köln (Germany)
Tel.: +49-221-716121-13
Majid.Lenz@asienhaus.de
www.asienhaus.de
www.asienhaus.de/ressourcen

Tata letak dan desain:

Zaadstra Design
(www.zaadstra.design)

Karya ini diterbitkan di bawah
Lisensi Creative Commons 4.0
(CC BY-SA 4.0)

Didukung oleh Engagement Global atas nama



MISEREOR
● IHR HILFSWERK

Brot für die Welt dengan dana dari
Church Development
Services



BROT FÜR ALLE

Tanggung jawab atas isi makalah ini ada pada penerbit, posisi yang disajikan di sini tidak mencerminkan posisi Engagement Global gGmbH dan Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

Terjemahan: Owlingua Translation Services

Pengutipan: Pye, Oliver, Arianti Fitri, Rizal Assalam, Michaela Haug and Janina Puder (2021): Transisi yang Adil dalam Industri Sawit: Sudut Pandang Awal Köln/Bogor: Stiftung Asienhaus, Sawit Watch, Transnational Palm Oil Labour Solidarity.